

MEMBERESKAN POLEMIK TAMBANG NIKEL

Sengkarut pertambangan nikel kembali terjadi di tengah upaya meningkatkan nilai tambah dari sumber daya mineral nasional. Kali ini, pemerintah bersikap responsif terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan di sekitar Kepulauan Raja Ampat.

Aliifan Asma'yi, Anshary M. Sukma & M. Ryan Hidayatullah
redaksi@bisnis.com

Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih bergerak cepat merespons pertambangan nikel yang dilakukan di sekitar Kepulauan Raja Ampat. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto ikut memberikan perhatian khusus terhadap kabar yang sempat viral di jagat maya tersebut.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) langsung membekukan sementara izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang melakukan penambangan nikel di kawasan tersebut. Hal itu dilakukan agar pemerintah bisa melakukan investigasi langsung ke lapangan dan mengetahui apakah terjadi pelanggaran.

"Untuk sementara kami hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, dan kami akan cek. Apapun hasilnya nanti, kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan dilakukan," kata Menteri ESDM Bahil Lahadalia, pekan lalu.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, ada sekitar lima perusahaan yang telah mengantongi IUP nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dari kelima IUP tersebut, baru satu perusahaan yang telah menjalankan operasi penambangan bijih nikel, yakni PT CAG Nikel yang merupakan anak usaha PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM).

Akan tetapi, kata Bahil, lokasi tambang nikel CAG Nikel berlokasi cukup jauh dari destinasi pariwisata bahari yang ada di Raja Ampat, yakni mencapai 40 kilometer.

"Ada gambar yang diperlihatkan seperti Pulau Pianemo. Pianemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat,

Saya sering di Raja Ampat. Jadi, Pulau Pianemo dengan [area tambang] GAG Nikel itu itu kurang lebih 30—40 kilometer," ujarnya.

Respons tidak kalah cepat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Lembaga tersebut bahkan meneghal dan menghentikan sementara kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Hal itu dilakukan sesuai pengawasan terhadap kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat pada 26—31 Mei 2025 ditemukan sejumlah pelanggaran.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq mengatakan bahwa tindakan tegas tersebut diambil sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekologis penting.

Hanif membeberkan ada empat perusahaan di dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat yang semuanya merupakan tambang nikel. Keempat perusahaan yang menjadi objek pengawasan tersebut adalah PT CAG Nikel (GN), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).

"Seluruhnya telah mengantongi izin usaha pertambangan, tetapi hanya GN, KSM, dan ASP yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan [PPKH]," ujarnya.

Menurutnya, hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan

tata kelola pulau kecil.

Anugerah Surya Pratama, misalnya diketahui melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian.

Hal tersebut terbukti pada saat dilakukan pengawasan ditemukan kolam *settling pond* jebol akibat curah hujan tinggi. Dari visual menggunakan drone terlihat pesisir air laut terlihat keruh akibat sedimentasi.

Kemudian, GAG Nikel disebut tidak melakukan pembukaan lahan di luar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan telah memiliki persetujuan teknis Baku Mutu Air Limbah untuk pengelolaan air larian, tetapi belum melakukan pembuangan ke lingkungan karena belum memiliki sertifikat laik operasi.

Selain itu, Mulia Raymond Perkasa ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele, sehingga seluruh kegiatan eksplorasi dihentikan.

Mulia Raymond juga tidak memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan. Perusahaan memulai kegiatan eksplorasi pada tanggal 9 Mei 2025 di area Pulau Batang Pele Kabupaten Raja Ampat dengan membuat sejumlah 10 mesin bor *coring* untuk pengambilan sampel *coring*.

Selanjutnya, Kawei Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai. Di wilayah KSM

ditemukan dugaan terjadinya sedimentasi pada akar mangrove yang diduga berasal dari areal *stockpile*, *jetty*, dan sedimentasi di area *outfall sediment pond* Salasih dan Yehbi.

KONDISI BAIK

Secara terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa berdasarkan pantauan udara menunjukkan tidak ada sedimentasi signifikan di sepanjang pesisir Raja Ampat. Oleh karena itu, dia menilai secara umum, tambang GAG Nikel tersebut dalam kondisi baik.

"Bukaan lahan tambang ini tidak terlalu luas. Dari total 263 hektare, 131 hektare sudah direklamasi dan 59 hektare di antaranya telah dinyatakan berhasil menurut penilaian reklamasi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah besar di sini," ujar Tri saat mendampingi Bahil meninjau langsung Pulau Gag.

Tri pun memastikan bahwa langkah tindak lanjut berupa penugasan tim inspektur tambang untuk menyusun laporan dan melakukan evaluasi menyeluruh, sebelum rekomendasi apa pun segera dieksekusi.

Dia menegaskan bahwa keberadaan GAG Nikel di Raja Ampat sepenuhnya berjalan sesuai dengan kerangka hukum dan tata ruang daerah.

Tri menyebutkan, awalnya CAG Nikel beroperasi di bawah skema kontrak karya (KK), dan menjadi salah satu dari 13 KK yang oleh Undang-Undang Kehutanan dikuculkan dari larangan aktivitas di hutan lindung.

Selanjutnya, ketentuan UU

No. 4/2009 yang kini telah mengalami empat kali revisi terakhir melalui UU No. 2/2025 menegaskan bahwa izin tambang yang sudah diterbitkan tidak akan mengubah peruntukan tata ruang yang berlaku.

Dalam kunjungan Menteri ESDM ke Pulau Gag, puluhan warga Pulau Gag meminta Menteri ESDM untuk segera mengembalikan operasional pertambangan di Pulau Gag, karena bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

Di sisi lain, Plt Presiden Direktur PT GAG Nikel Arya Arditya menegaskan pihaknya bakal menghormati dan menerima sepenuhnya keputusan Menteri ESDM untuk menghentikan sementara kegiatan operasionalnya di Pulau Gag hingga proses verifikasi lapangan selesai.

"GAG Nikel telah memiliki seluruh perizinan operasi, dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip *good mining practices*. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi kepada Kementerian ESDM," ujar Arya.

Menurutnya, CAG Nikel beroperasi di luar daerah konservasi ataupun Geopark Unesco. Izin operasional yang didapat oleh perusahaan, kata dia, termasuk dalam Kawasan Penambangan Raja Ampat di dalam tata ruang daerah.

Selain itu, CAG Nikel juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk mengawasi dan monitoring jalannya operasional tambang. (Yanita Patriella) E3



Realisasi Investasi Hilirisasi Nikel di Indonesia



Save & Share

Dalam 5 tahun terakhir, capaian PNT nikel sebesar 100% baru terjadi pada 2023 dan 2024.

Fluktuasi realisasi PNT pada 2020 hingga 2022 terjadi lantaran banyaknya smelter nikel yang tidak terintegrasi atau *stand alone* dengan tambang.

Target Pembangunan Fasilitas Smelter Terintegrasi 2024

Jumlah Smelter Nilai Investasi



Besi
1 unit
US\$51,5 juta



Jumlah Nikel yang Ditambang dan Diproses di Indonesia (juta ton)

